

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK OLEH PEDAGANG EGERAN BESAR DAN AKIBATNYA  
TERHADAP LAPORAN RUGI LABA PADA P-D "X" DI SURABAYA**

**S K R I P S I**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



KK.  
A. 2150/96  
Win  
t

**M I L I K  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
S U R A B A Y A**

**DIAJUKAN OLEH :**

**SUNGKOWO WINARTO**

**No. Pokok : 048712711**

**K E P A D A**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A**

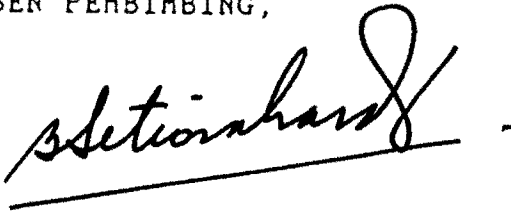
**1995**

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR DAN AKIBATNYA TERHADAP  
LAPORAN RUGI LABA PADA P.D "X" DI SURABAYA

DIAJUKAN OLEH  
SUNGKOWO WINARTO  
No. Pokok : 048712711

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



DRS. EC. BUDI SETIORAHARDJO. AK.

TANGGAL 26/9-96

KETUA JURUSAN,



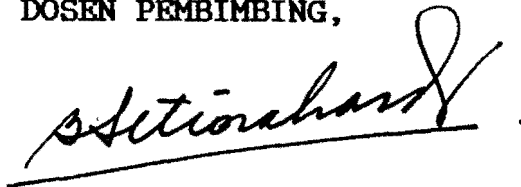
DRA. EC. HARIATI HAMZENS. AK.

TANGGAL 26/9-96

SURABAYA, ... 11-05-95 .....

TELAH DISETUJUI DAN SIAP UNTUK DIUJI

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Setiorahardjo', is written over a horizontal line.

(Drs. Ec BUDI SETIORAHARDJO, Ak)

---

## B A B IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Secara umum seperti yang penulis kemukakan, masalah yang terjadi pada P.D. "X" adalah penentuan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Pertambahan Nilai keluaran menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan perusahaan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak sebagai dasar dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai Keluaran terlalu tinggi.

Hasil yang didapat dari pembahasan dan pemecahan masalah adalah : bahwa perusahaan akan dapat menghindari kerugian yang cukup besar apabila dasar pengenaan pajak yang dipakai sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pembeli atau pelanggan. Akhirnya dari seluruh uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan :

1. P.D. "X" belum memberikan perlakuan yang layak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai keluaran. Perusahaan dalam menentukan dasar pengenaan pajak sebagai dasar dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai menggunakan harga jual sebagai dasarnya. Padahal dalam perjanjian dengan pembeli telah disebutkan bahwa harga jual sudah termasuk PPN. Akibatnya perusahaan ikut menanggung

Pajak Pertambahan Nilai keluaran atas penjualan tersebut.

2. Dengan semakin besarnya omzet/penjualan yang dikarenakan terlalu tingginya dalam penetapan dasar pengenaan pajak, maka akan terjadi overstated dalam penyajian pos penjualan pada laporan keuangan, khususnya laporan Rugi-Laba perusahaan menjadi kurang wajar.
3. Dengan terjadi overstated dalam penyajian laporan rugi-laba khususnya pos laba, maka akan berakibat pada besarnya pajak penghasilan yang dibayar akan lebih besar dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.

#### 4.2. Saran

Dengan memperhatikan pembahasan tadi, saran-saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan adalah :

Didalam melakukan pencatatan penjualan, khususnya penjualan kepada langganan yang menjadi PKP, maka perusahaan hendaknya memisahkan antara penjualan yang sebenarnya dengan PPN Keluaran, yaitu dengan cara sebagai berikut :

$DPP = \text{Penjualan} \times (100/110).$

- DPP adalah dasar pengenaan pajak yang dipakai sebagai dasar dalam menentukan besarnya PPN.

Disamping itu juga merupakan penjualan sebenarnya yang terjadi.

- Penjualan merupakan jumlah tagihan yang harus di-

bayar oleh pelanggan, yaitu merupakan penjualan ditambah dengan PPN Keluaran.